

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama:Ristin Martania
NIM :222014059**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama: Ristin Martania
NIM : 222014059**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

SURATTANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah
Nama : Ristin Martania
Nim : 222014059
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
pada tanggal, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



(Sunardi, Drs, S.E, M.Si)
NIDN/NBM: 0206046303/784021

(Muhammad Fahmi, S.E., M.Si)
NIDN/NBM:0229097804/7804/1997277

Mengetahui,
Dekan
U. b Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajudin, S.E., M.Si., AK., CA)
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ristin Martania

NIM : 222014059

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, Januari 2019

Penulis


Ristin Martania
NIM.222014059

ABSTRAK

Nama: Ristin Martania/222014059/2019/Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besarkah pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Penelitian ini menggunakan populasi semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Pengujian dilakukan menggunakan statistik SPSS dengan regresi linear. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa tingkat ketergantungan daerah (PAD), tingkat ketergantungan pada pusat (DAU), belanja modal (BM), Status daerah (Kabupaten/Kota), dan ukuran daerah (TA) berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tetapi untuk variabel belanja modal dan status daerah, arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif.

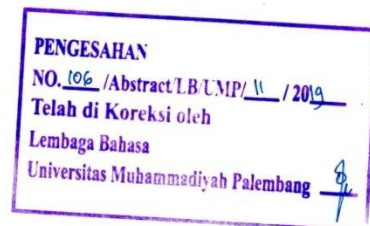
Kata Kunci: tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, status daerah, ukuran daerah, kinerja pemerintah

Abstract

Ristin Martania/222014059/2019/ *The Influence of the Characteristics of Local Government Performance toward the Organization of the Local Government District/city in South Sumatra Province/ Public Sector Accounting*

This research was aimed at determining whether or not there was a significant influence of the characteristics of local government performance toward the Organization of the local government district/city in South Sumatra Province. The performance measurement methods through the guidelines performance evaluation of organization of region government (EKPPD). The research location was all district/cities in South Sumatra Province. There were 15 districts/cities used as samples which have met the specified criteria of the author. Data collection was through documentation. Data analysis was through test using SPSS statistics with linear regression. Based on the results of sports statistics of linear regression with SPSS showed that the level of dependency the region (PAD), the level of dependence on the Centre (DAU), capital expenditures (BM), the Status of the area (County/City), and the size of the area (TA) influenced the performance of the Organization of the local government, yet to variable capital expenditures.

Key words: regional wealth levels, the level of dependency on the Central, capital expenditures, the status of the region, the size of the area, the performance of the Government



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan).**” skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif jurusan Akuntansi Pada Fakultas eEkonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sunardi, Drs, S.E, M.Si dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E,AK.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina,S.E,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darma Yanti selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Terkhusus kepada yang tercinta dan saya banggakan Bapak Fauzi dan Ibu Desmi yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan kasi sayang yang tulus dan ikhlas.
7. Saudara dan saudariku Defa Lirinsi, Rigen Rinaldi, dan yang paling kecil Citra Cahaya yang telah senantiasa memberikan doa dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Terimah kasih kepada keluarga Bapak Asri dan Ibu Rina (mamang dan bicik) dan keluarga Bapak Sutono dan ibu Lina (wawakku) yang telah mendidikku dan membantuku.
9. Sahabat seperjuanganku skripsiku yang telah membantu dalam menyelsaikan skripsi ini dan selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-temanku yang selalu memberikan support.
11. Teman-teman KKNku posko 180 yang selalu memberikan canda tawa dan senyuman yang ikhlas dan tek terlupakan.

12. Semua teman-teman angkatan 2014, paket 12.
13. Teman yang istimewa yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Palembang, Januari 2019

Penulis

Ristin Martania

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Masalah.....	21
D. Manfaat Penelitian	22
BAB IKAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Teori Agensi.....	23
2. Otonomi Daerah	25

3. Tujuan Otonomi	26
4. Prinsip Otonomi	26
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	27
6. Fungsi APBD	27
7. Siklus APBD	29
8. Karakteristik pemerintah	30
9. Tingkat kekayaan daerah.....	30
10. Tingkat ketergantungan pada pusat.....	33
11. Belanja Modal	37
12. Status Daerah.....	40
13. Ukuran Daerah	43
14. Manajemen Aset.....	46
15. Bentuk Aset	49
16. Kategori Aset.....	49
17. Pengelolaan Aset Daerah	51
18. Pandangan Aset Dari Konsep Hukum.....	52
19. Siklus Hidup Aset.....	55
20. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	56
21. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja	59
22. Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja	59
23. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	60
24. Sumber Informasi EKPPD.....	64
25. Asas Pelaksanaan EKPPD.....	65

26. Peringkat Indeks Ekppd	65
27. Maksud dan Tujuan Ekkpd	66
28. Tindak Lanjut Hasil Evalwasi	67
29. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	67
B. Penelitian Sebelumnya	68
C. Kerangka Pemikiran.....	76
D. Hipotesis Penelitian.....	77
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Jenis Penelitian.....	78
B. Lokasi Penelitian.....	79
C. Operasional Variabel.....	79
D. Populasi dan Sampel	81
E. Data yang Diperlukan	83
F. Metode Pengumpulan Data.....	84
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	85
1. Analisis Data	85
2. Teknik Analisis	86
a. Uji Asumsi Klasik	87
b. Rancangan Uji Regresi Linear Berganda.....	89
c. Uji Hipotesis.....	91
1) Uji F	91
2) Uji T	92

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	95
A. Hasil Penelitian	95
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan	95
2. Arti Logo Provinsi Sumatera Selatan.....	96
3. Kebudayaan Sumatera Selatan.....	97
4. Visi	98
5. Misi	98
6. Tujuan	99
7. Struktur Pemerintahan Daerah	101
8. Gambaran singkat tentang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	101
9. Visi	106
10. Misi	106
11. Struktur Organisasi BPKAD	106
12. Tugas dan Fungsi	107
13. Gambaran Jawaban Responden.....	116
14. Daftar Data	116
15. Proses Pengujian	118
16. Data Persentase	119
17. Analisis Statistik Deskriptif.....	120
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	121
a. Uji Asumsi Klasik.....	121
b. Uji Regresi Linear Berganda.....	126
c. Uji Hipotesis.....	129
1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	129

2. Uji Hipotesis Secara Slimutan (Uji F)	133
C. Pembahasan Hasil Hipotesis	135
1. Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah	135
2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat Terhadap Kinerja pemerintah daerah	136
3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	137
4. Pengaruh Status Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	138
5. Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	138
6. Pengaruh Ke Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Status Daerah, Belanja Modal, dan ukuran daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola dana dan mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Menurut PP tersebut pasal 1, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) menggunakan laporan pemeriksaan pemerintah daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, aspirasi masyarakat akan lebih mudah disalurkan dan dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa Undang-Undang No 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus:

1. Mampu mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan.
2. Mampu membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Mampu mencari sumber-sumber keuangan sendiri.
4. Mempunyai personil dan sarana prasaranan sendiri.

Menurut Wiratna (2015 : 230) asal kata otonomi dari bahasa yunani, autos artinya sendiri dan namos yang artinya Undang-Undang atau aturan. Maka otonomi bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur diri sendiri

Menurut Wulandari, Iryanie (2017 : 01) otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengukur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi otonomi diatas yang terdapat dari berbagai sumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi adalah suatu hak atas wewenang suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerah masing-masing dengan kemampuan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sendiri mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemahiran daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat, termasuk mandiri dalam hal keuangan. Munculya otonomi daerah juga merupakan suatu wujud pengembangan bangsa dan negara indonesia yang menginginkan perubahan kinerja dalam proses kemajuan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah:

1. Mencegah pemusatan kekuasaan.
2. Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam membangun ekonomi didaerah masing-masing.
4. Adanya kesentralan politik.
5. Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing.

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan

akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) suatu pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK salah satunya berupa temuan audit. Hal ini dapat menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan audit BPK dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik. Dengan demikian penting untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah memperoleh

informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Karakteristik pemerintah daerah adalah suatu ciri-ciri khusus pemerintah daerah. Maka dari itu karakteristik inilah yang akan menjadi pembeda satu daerah dengan daerah yang lainnya, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, perbedaan karakteristik antara daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, *leverage* daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, belanja modal, status daerah, dan lain sebagainya.

Tingkat kekayaan daerah pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah pendapatan asli daerah. Adapun pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan pendapatan asli daerah karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari keuangan sumber daya pada pemerintah tersebut. Jumlah dan kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang baik serta investasi yang

tinggi disuatu daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah tersebut.

Menurut Baldric Silegar (2017 : 32), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Wulandari, Iryanie (2017 :23), pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemda dengan ukuran dan kekayaan asli daerah yang besar seharusnya memiliki nilai skor kinerja yang tinggi. Jika Pemerintah daerah dengan ukuran dan pendapatan asli daerah yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemda tersebut

harus melakukan evaluasi atas kinerjanya bahwasanya kinerjanya bearti tidak lebih baik dibanding Pememerintah daerah dengan ukuran dan pendapatan asli daerah yang memang lebih kecil. Pemerintah daerah dengan ukuran dan pendapatan asli daerah yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelolah dalam memanfaatkan kekayaan yang dimiliki demi pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah yang rendah memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Ketergantungan tersebut menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah yang rendah.

Disamping ukuran dan tingkat kekayaan Pemerintah daerah, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daaerah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Walaupun penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh Pemerintah daerah, namun dalam penggunaannya harus mengacu pada tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu dengan semakin besarnya penerimaan dana alokasi umum oleh satu Pemda, maka Pemerintah Pusat akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi dana alokasi umum dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang lebih sedikit menerima dana alokasi umum.

Menurut Baldric Siregar (2017 : 87), dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari dana transfer umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Robert dan Kawan-kawan (2002), di era otonomi daerah, distribusi dana alokasi umum atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk *blok grant*.

Hal ini bisa dilihat dari tingkat ketergantungan dengan pemerintah yang diukur dengan besarnya dana alokasi umum, memiliki nilai rata-rata yang hampir sama pada setiap kategori. Dalam penentuan skor kinerja yang merupakan hasil dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) tidak hanya aspek kinerja keuangan saja namun juga kinerja non keuangan Pemda sehingga hasilnya tidak signifikan, dalam penggunaan dana alokasi umum Pemda seharusnya menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan dan lain-lain sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.

Maka dari itu tingkat ketergantungan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam

membiayai bangunan. Dengan demikian, semakin tinggi dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pula pelayanan yang diberikan Pemda kepada masyarakat, sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat.

Belanja modal sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktifitas nonekonomi khususnya dalam melakukan sosial kemasyarakatan diberbagai ruang publik yang tersedia.

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal biasanya terkait erat dengan investasi Pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya

infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak bangunan yang dilakukan oleh Pemda akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Menurut Rudy Badrudin (2017: 21), belanja modal sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut produk domestik regional bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

ukuran daerah menyatakan besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong

untuk mengungkapkan hal hal yang bersipat *good nws*. *Good nws* tersebut berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan kinerja.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan otonomi dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu penyelenggaraan otonomi yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang otonomi daerah No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Rasio kemandirian merupakan salah satu cara mengukur kinerja Provinsi Sumatera Selatan, rasio kemandiraian dapat dilihat dari perimbangan seberapa besar dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Risma Diri Artha dan Kawan-Kawan, tahun (2015), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara teknik dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat,

belanja modal, leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rinas dan Dul Muid, tahun (2014), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah (size, wealth, status, dana perimbangan, belanja daerah) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011, penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa dari 6 faktor yang diteliti (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, status daerah, dana pertimbangan, belanja daerah, dan temuan audit BPK) terbukti bahwa tingkat kekayaan dan status daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq Nur Rahardjo, tahun (2013), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintahan daerah, Metode dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa ukuran pemerintah, tingkat

ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, belanja modal, terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan, temuan audit BPK, tingkat kekayaan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Penelitian lainya juga dilakukan oleh Yayuk dan Payamta (2014), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerntah daerah Kabupaten/Kota di indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di indonesia masuk dalam katagori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan temuan audit daerah (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal (BM) tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif, sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintag daerah dengan tingkat signifikan 5%, dan hanya berpengaruh

signifikan 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan alokasi umum (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari penelitian diatas penelitian juga dilakukan oleh Galang Afrian (2016), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
2. Apakah temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh galang afrian bertujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupeten/Kota di provinsi Riau
2. Menguji pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
3. Menguji pengaruh leverage terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Privinsi Riau.

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dan analisisnya analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit (BPK), dan leverage adalah

positif dan signifikan. Diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja pemerintah daerah. juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leverage secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 76,90%

Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh Ristu Pratiwi dan Y Anni Aryani (2016), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. Hasil dari penelitian ini ialah yang pertama variabel independen yang kemungkinan berpengaruh pada opini audit dengan menggunakan kedua uji diatas adalah tingkat ketergantungan, kekayaan, belanja, tindak lanjut, dan masa kerja kepada daerah. yang kedua ukuran pemerintah daerah signifikan pada uji binomial dan tingkat pendidikan signifikan dengan menggunakan uji ordinal.

Penelitian tentang karakteristik juga dilakukan oleh Baldrice Siregar (2015), dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dan tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay laporan keuangan. Nilai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

tidak signifikan mempengaruhi audit delay laporan keuangan.

Selanjutnya juga dilakukan oleh Zulia Dwi Meilina dan Kawan-kawan (2016), Dengan Judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, Belanja Daerah, dana alokasi umum, dan Opini Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Armaja dan Kawan-kawan (2015), dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.

Penelitian yang terakhir juga dilakukan oleh Ni Made Suryaningsi dan Eka (2016), dengan judul Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kemakmuran, status daerah, dan belanja modal daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat dan opini audit berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Data yang terkait dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, status daerah, dan ukuran daerah. data ini dapat menunjukkan kondisi daerah yang memiliki kategori kinerja yang tinggi, sangat tinggi, dan sedang. Untuk menentukan kategori keadaan

suatu daerah dapat dilihat pada data skor kinerja. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah besar kecilnya jumlah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat mana daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tabel 1.1 juga menunjukkan daerah yang memperoleh pendapatan asli yang tinggi atau meningkat ini artinya daerah tersebut sudah memiliki tingkat kemandirian yang baik dan tinggi. Jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka belanja modal yang diambil dari pendapatan asli daerah tersebut. Ini kondisi yang baik untuk suatu daerah karena dapat menurunkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal bergantung pada dana transfer dari pemerintah yaitu dana alokasi umum.

Tabel 1.1 juga menjelaskan bahwa suatu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal yang meningkat di setiap tahunnya tidak menjamin untuk kinerjanya juga meningkat atau dapat dikategorikan kinerjanya tinggi, sangat tinggi ataupun kurang. Misalnya dapat dilihat dari Kota Palembang yang mana dikatakan di setiap tahunnya meningkat tetapi dapat dilihat untuk kinerja mengalami penurunan di dua tahun sebelumnya.

Pendapatan asli daerah dapat dikatakan hal yang paling berpengaruh di suatu daerah ini dikarenakan pendapatan asli daerah dapat menunjukkan seberapa maju dan berkembangnya daerah tersebut. Pendapatan asli daerah dapat menjadi wadah untuk suatu daerah meningkatkan kemandirian suatu

daerah. pendapatan asli daerah ini diperoleh dari sumber-sumber yang mana diperoleh dari daerah masing-masing, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu dalam hal pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dari latar belakan masalah dan teori diatas dan juga penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainya yang saling berkaitan, berikut data/tabel tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Belanja Modal, Status Daerah, dan Ukuran Daerah yang disajikan dalam tabel I.1, tabel 1.2, dan tabel 1.3

Tabel I.1
Total PAD,DAU, dan Belanja Modal
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/kota	Tahun	PAD (Rp)	DAU (Rp)	Belanja Modal (Rp)
1	Lahat	2016	97.733.313.403	703.887.513.000	373.661.358.126
		2015	189.584.741.246	622.781.695.000	471.385.151.682
		2014	125.319.372.145	615.240.306.000	369.550.015.209
2	Musi Banyuasin	2016	229.584.395.649	324.837.504.000	569.702.257.606
		2015	181.795.444.466	131.033.381.000	408.512.810.287
		2014	172.924.886.330	411.869.675.000	1.377.481.000.263
3	Musi Rawas	2016	105.070.860.821	641.789.648.000	432.324.100.108
		2015	97.998.166.925	578.786.009.000	448.822.421.382
		2014	120.152.665.893	593.564.398.000	413.464.154.972
4	Muara Enim	2016	176.904.592.327	673.162.366.000	566.871.495.939
		2015	178.245.088.811	610.384.296.000	600.742.048.393
		2014	203.733.311.532	593.564.398.000	634.278.880.940
5	Ogan Komering Ilir	2016	332.007.158.560	1.049.995.034.000	560.990.403.527
		2015	110.225.039.890	958.999.224.000	474.153.706.814
		2014	145.590.658.057	931.158.869.000	444.998.104.469
6	Ogan Komering Ulu	2016	104632.393.216	635.551.932.000	167.777.810.850
		2015	98.756.154.905	568.562.532.000	223.476.288.576
		2014	79.344.461.050	568.771.201.000	290.864.389.075
7	Palembang	2016	777.398.880.783	1.292.124.896.000	577.697.336.830
		2015	736.926.505.929	1.210.604.984.000	628.995.346.844
		2014	734.218.688.569	1.203.662.453.000	618.886.821.696
8	Prabumulih	2016	89.087.000.000	414.173.572.000	228.274.659.622
		2015	72.236.033.965	406.701.018.000	299.372.657.603
		2014	64.169.588.731	383.313.715.000	351.248.242.268
9	Pagar Alam	2016	50.114.156.672	390.188.364.000	246.648.045.186
		2015	53.418.726.125	351.582.212.000	276.894.553.975
		2014	40.661.820.108	354.727.429.000	303.798.664.146
10	Lubuk Linggau	2016	77.465.291.037	446.789.308.000	205.417.239.958
		2015	66.725.204.496	415.549.771.000	215.943.462.860
		2014	50.181.249.514	414.757.867.000	295.111.299.772
11	Banyuasin	2016	94.171.398.677	930.550.856.000	368.488.105.881
		2015	96.219.655.177	829.437.390.000	439.408.057.812
		2014	106.917.589.923	824.218.824.000	653.602.575.156
12	Ogan Ilir	2016	170.505.159.000	623.839.463.000	222.327.614.406
		2015	42.843.410.496	557.402.625.000	210.013.463.224
		2014	49.061.109.820	561.376.933.000	334.233.119.083
13	OKU Timur	2016	53.116.781.200	760.211.691.000	321.249.671.402
		2015	64.280.630.983	693.714.985.000	207.580.658.411
		2014	145.590.658.057	680.713.525.000	238.864.441.196
14	OKU Selatan	2016	41.160.000.000	588.216.178.000	373.153.188.095
		2015	38.197.172.490	523.633.902.000	327.452.630.920
		2014	33.663.401.203	512.126.270.000	326.392.866.392
15	Empat Lawang	2016	31.470.586.630	416.952.841.000	198.992.372.066
		2015	27.118.381.319	366.775.204.000	279.782.691.976
		2014	32.656.389.092	360.871.981.000	365.014.955.983
16	Panukal Abab Lematang Ilir	2016	32.898.491.586	319.054.010.000	351.124.240.317
		2015	4.236.965.850	186.114.381.000	69.608.012.397
		2014	8.903.213.895	110.386.837.000	237.231.202.731
17	Musi Rawas Utara	2016	26.428.531.091	378.121.540.000	355.012.452.385
		2015	29.172.475.400	324.442.113.000	317.372.259.744
		2014	629.919.577.655	284.408.593.000	355.726.260.173

Sumber : Sumber: laporan realisasi anggaran APBD kabupaten/kota se-provinsi sumatera selatan
(www.djpk.kemenkeu.go.id) atau www.djpk.go.id

Tabel I.2
Data Total Aset
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Total Aset
1	Kab. Lahat	2016	2.772.653.655.148
		2015	2.636.999.350.691
		2014	3.169.864.446.537.74
2	Kab. Musi Bayuasin	2016	7.564.834.177.845
		2015	6.814.157.098.331
		2014	10.218.372.549.719.50
3	Kab. Musi Rawas	2016	3.432.745.888.994
		2015	3.462.645.651.479
		2014	4.787.452.949.091.81
4	Kab. Muara Enem	2016	4.616.358.748.719
		2015	4.381.953.622.572
		2014	5.125.465.378.988.57
5	Kab. Ogan kemering ilir	2016	3.314.522.960.391
		2015	4.534.111.144.929
		2014	4.004.729.766.185.55
6	Kab. Ogan kemering ulu	2016	2.595.601.870.566
		2015	3.281.774.681.734
		2014	3.930.664.169.221.05
7	Kota Palembang	2016	7.493.109.764.660
		2015	6.391.429.764.324
		2014	6.937.237.170.348.94
8	Kota Prabumulih	2016	2.514.674.680.393
		2015	2.440.907.402.219
		2014	1.818.626.057.399.49
9	Kota Pagar Alam	2016	1.863.162.822.687
		2015	1.662.530.014.509
		2014	2.145.104.062.830.61
10	Kota Lubuk Linggau	2016	2.300.506.409.744
		2015	2.221.375.915.221
		2014	2.090.903.408.186.22
11	Kab. Banyuasin	2016	3.936.076.034.893
		2015	3.759.574.880.990
		2014	
12	Kab. Ogan Ilir	2016	2.251.240.807.348
		2015	2.176.935.549.471
		2014	2.710.143.500.277.71
13	Kab. Ogan Timur	2016	2.009.546.443.360
		2015	1.644.832.134.826
		2014	2.138.556.951.391.42
14	Kab. Ogan Selatan	2016	2.276.494.013.726
		2015	2.278.856.405.961
		2014	
15	Kab. Empat Lawang	2016	1.768.750.813.637
		2015	1.558.185.534.968
		2014	1.555.802.602.536.21
16	Kab. Panungkal Abab Lematang Ilir	2016	1.219.508.339.645
		2015	855.166.635.434
		2014	525.496.804.331.23
17	Kab. Mesi Rawas Utara	2016	1.546.749.290.686
		2015	669.480.754.007
		2014	428.537.882.303.44

Sumber : Sumber: laporan realisasi anggaran APBD kabupaten/kota se-provinsi sumatera selatan (www.djpk.kemenkeu.go.id) atau www.djpk.go.id : 2018

Tabel I.3
Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/kota	Tahun	kinerja Daerah
			Skor
1	Lahat	2016	3,0574
		2015	3,0799
		2014	2,6294
2	Musi Banyuasin	2016	3,0575
		2015	2,9850
		2014	3,0727
3	Musi Rawas	2016	3,1996
		2015	3,1092
		2014	3,0680
4	Muara Enim	2016	3,1195
		2015	3,1114
		2014	3,0685
5	Ogan Komering Ilir	2016	3,1356
		2015	3,1362
		2014	3,0303
6	Ogan Komering Ulu	2016	2,9876
		2015	2,8871
		2014	2,4887
7	Palembang	2016	3,0768
		2015	2,9114
		2014	2,6894
8	Prabumulih	2016	3,0161
		2015	2,9593
		2014	2,5976
9	Pagar Alam	2016	2,9768
		2015	2,6741
		2014	2,6133
10	Lubuk Linggau	2016	2,9761
		2015	2,8969
		2014	2,9331
11	Banyuasin	2016	2,9786
		2015	3,0752
		2014	3,0846
12	Ogan Ilir	2016	3,0434
		2015	2,9143
		2014	2,8625
13	OKU Timur	2016	2,8131
		2015	2,8944
		2014	2,9105
14	OKU Selatan	2016	2,7696
		2015	2,8824
		2014	2,7398
15	Empat Lawang	2016	2,8922
		2015	2,7425
		2014	2,6623
16	Panukal Abab Lematang Ilir	2016	-
		2015	0,0000
		2014	-
17	Musi Rawas Utara	2016	-
		2015	0,0000
		2014	-

otda.kemendagri.go.id/.../KEPMENDAGRI%20EKPPD%20TERHADAP%20LPPD%20...

Pada kenyataannya, kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan dikatakan belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pendapatan

asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan belanja modal. Yang masi ada naik turunnya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal disetiap kabupaten Adapun perbandingannya sebagai berikut.

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terjadi kenaikan dan penurunan pada masing-masing daerah. Dapat dilihat daerah di Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah ditahun 2016 antara lain. Musi rawas, ogan kemering ulu, prabumulih, lubuk linggau, empat lawang, dan panungkal abab lematang ilir. Dan daerah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2016 yaitu. Lahat, muara enem, pagar alam, banyuasin, oku timur, dan musu rawas utara.

Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak mengalami penurunan, daerah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah ditahun 2016 yaitu. Musu rawas muara enem, banyuasin, oku timur, empat lawang, panungkal abab lematang ilir, dan musu rawas utara. Dan daerah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan PAD tahun 2016 yaitu. Lahat, ogan kemering ulu, prabumulih, pagar alam dan lubuk linggau.

Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah dikabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak mengalami kenaikan, daerah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah tahun 2014 yaitu. Musi rawas, muara enem, prabumulih, banyuasi, oku timur, empat lawang, panungkal abab lematang ilir, dan musu rawas utara.

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat dan nominal dana perimbangan lebih besar dari perolehan pendapatan asli daerah masing-masing daerah. Permasalahannya tidak terjadi pada kenaikan atau penurunan pada pendapatan asli daerah saja, namun juga dapat dilihat dari dana alokasi umum, belanja modal, dan total aset pada setiap masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari data di atas juga menunjukkan bahwa dapat dilihat tidak semua pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, status daerah dan ukuran daerah yang tinggi memiliki pendapatan dengan jumlah yang besar memiliki skor kinerja yang tinggi juga di setiap tahunnya. Dari data di atas dapat dilihat mana daerah yang mempunyai kinerja yang baik dan kinerja yang cukup baik ataupun yang kurang baik. Dan daerah yang masih cukup bergantung pada pemerintah pusat dengan tidak stabilnya pendapatan setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Karakteristik**

Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Seberapabesarkah pengaruh tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, status daerah dan ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara simultan?
2. Seberapabesarkah pengaruh tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, status daerah dan ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara persial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kekayaan Daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, status daerah dan ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara simultan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kekayaan Daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, status daerah dan

ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara persial

D. Manfaat Penelitian

Hasil berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai karakteristik pemerintah dan kinerja pemerintahan daerah.

2. Bagi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar memperhatikan kualitas anggaran dan belanja daerah. Baik dari pihak yang terlibat agar kualitas dalam pelaksanaan anggaran dapat tercapai.

3. Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Ceta Pertama. PT. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Catak Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Silegar Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wulandari, Iryanie. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetak Pertama. CV BUDI UTAMA. Yogyakarta.
- Robert dan Sidik. 2002. *Dana Alokasi Umum. Cetak Pertama*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Santoso Budi. (2015). *Keagenan (agency)*. Bogor. Ghalia indonesia
- Agung Gregorius. 2018 *SPSS*. Cetak Pertama. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Giovany. 2017. *SPSS*. Edisi Kesatu. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Mardiansmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Rudi Badrudin. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Cetak Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Dodi Silegar. 2018. *Manajemen Aset*. Cetak Pertama. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Artha Diri Risma dan Kawan-kawan. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Infestasi, Vol. 11, No.2, Hal.214-299.*
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Renas, dan Muid Dul. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Diponogoro Journal Of Accounting. Vol. 4, No.3, Hal. 1.*
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sudarsana Susila Hafidh dan Rahardjo Nur Shiddiq. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Diponogoro Journal Of Accounting. Vol. 2, No. 4, Hal. 1-13.*

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Harumiatidan Yayuk dan Payamta. 2014. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011*. Jurnal Akuntansi Pendidikan, Vol.3.No.2,Okteber 2014.

Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R.R 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume 8/No. 1/November 2011:1-94.

Nyi Made Suryaningsih Dan Eka Ardhani Sisdyani.2016.*Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.Vol.15.2.Mei 2016

Armaja, dkk. 2016. *Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dana belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah*. jurnal perspektif ekonomi darulsalam,3(2).ISSN 2502-6976.

Hafidh Susila Sudarsana Dan Shidiq Nur Raharjo.2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.Diponogoro Jurnal Of Acconting 2(4).Issn 2337-3806.

Galang Afrian.2016.*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BKP) Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.Vol.3 No.1 Februari 2016

Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Temuab Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15,<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>

Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. *Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana AlokasiUmum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal. Universitas Riau.

.Undang-Undang Republik Indonesia No.23. Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

Peraturan Pemerintah Dalam Negri No.26 Tahun 2006. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pemendagri No. 73 Tahun 2009. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja.*

Peraturan Pemerintah Dalam Negri No.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Dalam Daerah Ketentuan Pasal 52

Permendagri No. 13 Tahun 2006

www.djpk.depkeu.go.id

www.bps.sumsel.co.id